

PENEMPATAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT DI NIGER SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN GLOBAL WAR ON TERROR TAHUN 2013 - 2017

Dewa Made Nanda Wijaya¹⁾, D.A. Wiwik Dharmiasih²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾
¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: nanda.wijaya919@gmail.com¹⁾, wiwikd@gmail.com²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

United States as the victim of 9/11 tragedy launch the Global War on Terror to combat global terrorism and to secure its national security. Sahel as a region passed by the Sahara Dessert is becoming a place to hide, recruit, financing and training camp for global terrorist network. The rise of terrorist network in the Sahel cannot be separated from Sahel States condition which been categorized as least developed countries. To counter the rise of terrorist threat in the Sahel Region. United States deploy its military forces in Niger. This research analyzes and describe the objective of United States military deployment in Niger, especially from 2013 until 2017. This research used security and counterterrorism framework to explain the objective of United States military deployment in Niger. Methodology that used in this research is qualitative-descriptive. Data in this research were gathers from multiple sources such as book, journal, and government reports that related with this research.

Keywords: *United States of America, Niger, Security Cooperation, Counterterrorism.*

1. PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara yang mengalami serangan terorisme dalam Tragedi 9/11. Serangan tersebut ditujukan terhadap simbol ekonomi dan militer Amerika Serikat, yaitu gedung kembar *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon. Tercatat sebanyak 2.996 orang tewas dalam serangan teroris terburuk dalam sejarah Amerika Serikat (Plumer, 2013). Osama Bin Laden, pimpinan dari Al-Qaeda, mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Setelah Tragedi 9/11, Amerika Serikat kemudian mengambil berbagai langkah untuk memerangi jaringan kelompok teroris dan mencegah tragedi serupa terjadi.

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Amerika Serikat adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) atas Tragedi 9/11. Kebijakan GWOT mengidentifikasi aktor terorisme transnasional

sebagai ancaman fundamental bagi stabilitas keamanan nasional dan internasional (Bush White House, 2003). Untuk menghancurkan dan meminimalisir potensi ancaman, GWOT menekankan pada tindakan militer terhadap jaringan kelompok teroris transnasional, terutama jaringan Al-Qaeda (Record, 2003a)

Guna mempersempit ruang gerak jaringan terorisme global Pemerintah Amerika Serikat membangun berbagai kemitraan strategis. Salah satu dari kemitraan tersebut adalah kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dengan Niger di wilayah Afrika Barat. Niger sebagai negara yang tepat berada di tengah-tengah wilayah Sahel dan dilewati Gurun Sahara merupakan rute perdagangan senjata, narkoba dan pergerakan teroris (Litt, 2017). Pada akhir tahun 2017 dilaporkan setidaknya terdapat 800 pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Niger. Jumlah tersebut merupakan jumlah kedua

terbesar di Afrika setelah penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Djibouti yang berjumlah 4.000 orang (Norman, 2018).

Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger memunculkan perdebatan setelah terbunuhnya empat anggota pasukan khusus Green Berret dalam sebuah patroli di wilayah Tongo–Tongo, Niger, pada tanggal 4 Oktober 2017 (Browne, 2018). Kongres Amerika Serikat menilai bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki alasan yang kuat, seperti penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afganistan untuk menghancurkan Taliban yang mendukung Al-Qaeda. Niger bukanlah negara pelaku teror dan secara geografis merupakan negara yang kecil dan landlocked. Oleh sebab itu, alasan Pemerintah Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan militernya di Niger menjadi sangat menarik untuk diteliti. Sehingga penelitian ini lebih lanjut menjabarkan tujuan dari penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger dari tahun 2013 – 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka

Literatur pertama yang digunakan merupakan karya Solomon Effiong Udounwa (2013) yang berjudul *Boko Haram: Developing New Strategies to Combat Terrorism in Nigeria*. Udounwa (2013) dalam tulisannya memaparkan upaya penumpasan kelompok teror *Jama'atul Alhul Sunnah Lidda'wati Wal Jihad* atau Boko Haram di Nigeria. Boko Haram sebagai kelompok teror yang ingin menegakan hukum syariah Islam di Nigeria mulai melakukan tindakan kekerasan ekstrim pada tahun 2002. Selama

beberapa tahun, Pemerintah Nigeria mencoba memberantas Boko Haram dengan menekankan pada pendekatan *hard approach* yang menitikberatkan peranan militer untuk menangkap, menumpas, dan mencegah potensi serangan teror. Hal ini dapat dilihat dari peranan militer Nigeria dalam menjaga keamanan nasional negaranya. Peranan militer Nigeria semakin besar untuk memberantas kelompok Boko Haram, terutama setelah meningkatnya frekuensi serangan Boko Haram yang menewaskan 3.000 orang dari tahun 2009–2012 (Udounwa, 2013)

Selain melaksanakan operasi militer, Pemerintah Nigeria juga membentuk *National Focal Point on Terrorism* (NFPT) tahun 2007 dan resmi beroperasi tahun 2012. NFPT bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan agenda keamanan Nigeria. Selain itu, Pemerintah Nigeria juga memfokuskan pada penggunaan teknologi moderen untuk intelijen, deteksi, dan pengawasan sebagai strategi *counterterrorism* di Nigeria.

Tahun 2012, Pemerintah Nigeria melakukan penyatuan antara kekuatan militer dengan *soft power* untuk menangani masalah terorisme. Pendekatan *soft approach* yang dilaksanakan seperti melakukan kerja sama antar departemen, adanya kontrol batas negara untuk menekan penggunaan senjata ilegal, melakukan reformasi terhadap sistem hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Nigeria juga melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan infrastruktur untuk menangani isu terorisme. Kerja sama yang dilakukan dengan Amerika

Serikat secara khusus menekankan pada bantuan ekonomi, keamanan dan mitra utama Nigeria untuk memobilisasi bantuan internasional yang sangat dibutuhkan oleh negara tersebut.

Tulisan Udounwa (2013) memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk *counterterrorism* yang dilakukan oleh negara dalam merespon ancaman keamanan yang ada. *Counterterrorism* baik melalui usaha militer (*hard approach*), non-militer (*soft approach*), maupun penggabungan dari keduanya, sangatlah penting untuk menetralsir ancaman yang muncul dari kelompok teror. Melalui tulisan Udounwa (2013), penelitian ini mencoba melihat usaha negara dalam menangani ancaman kelompok teror, baik dengan cara memobilisasi militernya untuk menyerang basis kekuatan kelompok teror dan mencegah jatuhnya suatu daerah ke tangan kelompok tersebut melalui upaya penempatan unit-unit militer dan pemberian bantuan. Akan tetapi, tulisan Udounwa (2013) belum memberikan gambaran secara lengkap mengenai pentingnya kerja sama keamanan antar negara dalam memberantas kelompok teror. Serta faktor-faktor yang diperhatikan negara dalam melakukan kerja sama keamanan dan apa tujuan negara bersedia melakukan kerja sama.

Guna melengkapi tulisan Udounwa (2013) penelitian ini menggunakan literatur kedua yang ditulis oleh Gergerly Varga (2017) yang berjudul *Building Partnership in Challenging Times: The Defence Arrangements of Tunisia* (2017) memaparkan tentang kerja sama antara Tunisia dengan sejumlah negara untuk meningkatkan kapabilitas

pertahanannya terhadap ancaman terorisme yang semakin meningkat di negara tersebut.

Pemerintah Tunisia dalam upaya meningkatkan kemampuan keamanannya, melakukan kerja sama baik secara bilateral, regional dan multilateral dengan beberapa negara. Hal ini dilakukan karena secara kapabilitas militer, angkatan bersenjata Tunisia tidak begitu kuat dan mengalami kekurangan pendanaan untuk memperbarui persenjataan maupun dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Sejak tahun 2014, Pemerintah Tunisia mulai mendapat bantuan khusus dari Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Bantuan tersebut tidak terlepas dari pergantian rezim di Tunisia yang mulai menganut sistem demokrasi dan isu terorisme seperti ISIS. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat juga memandang kerja sama dengan Tunisia dapat membantu kepentingan keamanan Amerika Serikat untuk memerangi dan menghancurkan jaringan kelompok teror seperti ISIS yang beroperasi di wilayah tersebut.

Peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Tunisia terjadi ketika Pemerintah Amerika Serikat memberikan status *Major Non-NATO Ally* (MNNA) kepada Tunisia. Pemerintah Amerika Serikat dari tahun 2011 hingga 2014 memberikan bantuan sebesar 121 miliar USD untuk meningkatkan kemampuan *counterterrorism* dan penguatan keamanan perbatasan dengan hampir 106 miliar USD digunakan untuk membeli komponen persenjataan.

Tulisan Vagra (2017) menguatkan penelitian ini dengan memberikan justifikasi dari urgensi kerja sama keamanan antar negara dalam menghadapi isu keamanan

bersama, yaitu terorisme. Melalui kerja sama, negara dapat meningkatkan kapabilitas keamanan negaranya dengan bantuan negara lain yang juga memiliki kepentingan keamanan yang sama. Melalui kerja sama antar negaralah *counterterrorism* dapat berjalan dengan optimal. Tulisan Vagra berhubungan erat dengan penelitian ini yang ingin melihat kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dengan Niger dalam kegiatan *counterterrorism* menghadapi kelompok teror yang membahayakan keamanan nasional kedua negara.

2.1 Kerangka Pemikiran

Keamanan

Keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong negara untuk mengeluarkan kebijakan yang difokuskan untuk menghadapi ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negara itu sendiri. Buzan (1991) menyimpulkan bahwa keamanan merupakan sebuah kondisi tidak adanya ancaman atas nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia untuk menjalani kehidupannya.

Buzan dalam Wilson (2010) menyatakan bahwa permasalahan terorisme dapat dilihat menggunakan pendekatan keamanan nasional. Hal ini didasari oleh tujuan keamanan yang menginginkan sebuah kondisi hilangnya kondisi ancaman terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia untuk menjalani kehidupannya dan terorisme merupakan ancaman terhadap kondisi tersebut. Sejalan dengan pandangan Buzan, penelitian ini melihat keamanan internasional di wilayah Niger memiliki implikasi terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Hal

tersebut menjadi dasar bagi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger.

Counterterrorism

Counterterrorism diartikan sebagai upaya negara dengan menggunakan hukum, militer dan tindakan lainnya untuk menghancurkan atau mencegah gerakan terorisme (Bokhari, 2015). Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam mengatasi isu terorisme, yaitu; pendekatan *soft approach* dan *hard approach* (Romaniuk & Fink, 2012). Pendekatan *soft approach* merupakan pendekatan non-militer dengan menekankan pada pembuatan kebijakan-kebijakan yang tidak menggunakan kekerasan dan paksaan (Zakharchenko, 2007).

Hughes (2011) lebih lanjut menyatakan dalam menghadapi kelompok teror terdapat empat cara yang ditempuh oleh militer, tindakan tersebut berupa *Pursuit*, yaitu tindakan pengejaran terhadap pelaku dan kelompok teror. *Preparation*, berupa persiapan untuk menghadapi dan meminimalisir efek dari serangan kelompok teror. *Prevention*, berupa tindakan pencegahan terhadap potensi serangan dengan mengatasi penyebab atau sumber potensial dari tindakan teror. *Protection*, berupa tindakan perlindungan kepada warga negara dan institusi pelayanan publik.

Melalui keempat pendekatan tersebut, negara menggunakan kekuatan militernya untuk menghancurkan atau mencegah potensi ancaman keamanan yang berasal dari kelompok teror. Munculnya keempat pendekatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber ancaman terorisme yang tidak lagi berasal dari dalam negara,

melainkan sudah bersifat transnasional dan global.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan negara sebagai objek analisis utama. Objek tersebut kemudian dianalisis menggunakan Konsep Keamanan dan *counterterrorism* untuk menemukan jawaban atas penelitian ini, yaitu tujuan dari penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Terorisme di Amerika Serikat Sebelum 9/11

Aksi terorisme bukanlah sebuah fenomena baru di Amerika Serikat. Serentetan aksi serangan teror pernah mengguncang Amerika Serikat pada dekade 1990-an. Secara umum, serangan terorisme di Amerika Serikat dapat digolongkan dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu aksi terorisme domestik dan kedua, aksi terorisme internasional (Plumer, 2013). Peristiwa Bom Oklahoma 1995 dan Bom WTC 1993 merupakan dua contoh dari serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat sebelum Tragedi 9/11.

Peristiwa Bom Oklahoma yang terjadi pada tanggal 19 April 1995 merupakan serangan yang ditujukan terhadap Gedung Federal Alfred P. Murrah di Kota Oklahoma, Amerika Serikat. Gedung Federal Alfred P. Murrah merupakan kantor regional dari enam

Departemen Federal Amerika Serikat dengan jumlah staf sebanyak 550 orang. Serangan bom terjadi pada pukul 09.02 pagi, ketika sebuah truk meledak di depan Gedung Federal Alfred P. Murrah menyebabkan 169 orang tewas dan 675 orang luka-luka (Goins, 2017).

Serangan tersebut didalangi oleh Timothy James McVeigh dan Terry Lynn Nichols. Keduanya merupakan mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang memiliki sentimen anti pemerintah. Aksi serangan tersebut direncanakan oleh Timothy dan Terry sebagai aksi balasan terhadap kegagalan Pemerintah Federal Amerika Serikat dalam menangani Peristiwa Ruby Ridge dan Pengepungan Waco. Dua peristiwa tersebut dianggap oleh publik Amerika Serikat sebagai kasus penggunaan kekerasan berlebihan terhadap masyarakat sipil oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat. Peristiwa Bom Oklahoma 1995 sampai saat ini merupakan serangan terorisme domestik yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat (Goins, 2017).

Selain Peristiwa Bom Oklahoma 1995, dua tahun sebelumnya publik Amerika Serikat juga diguncang oleh serangan terorisme yang ditujukan terhadap Gedung WTC. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Bom WTC terjadi pada tanggal 26 Februari 1993. Publik digemparkan pada pukul 12.17 siang ketika sebuah truk yang terparkir di area batuan dasar B-2 gedung utara WTC meledak dan menyebabkan 6 orang tewas dan 1.040 orang luka-luka (Cook & Brown, 2018). Ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan struktural berupa lubang besar selebar 30m di area B-2, serta

merusak saluran listrik utama WTC dan mengakibatkan seluruh elevator di gedung utara dan selatan terhenti total. Selain itu, ratusan kendaraan yang terparkir di batuan dasar mengalami kerusakan total.

Serangan tersebut kemudian diketahui didalangi oleh Ramzi Yousef asal Pakistan dan dibantu oleh Eyad Ismoil seorang warga negara Yordania. Keduanya merupakan ekstrimis Islam fundamentalis yang mengaku sebagai bagian dari *The Liberation Army Fifth Battalion*. Selain keduanya, beberapa nama seperti Mahmud Abouhalima, Mohammad Salameh, Nidal A. Ayyad, Abdul Rahman Yasin, dan Ahmed Ajaj Yousef juga terlibat dalam serangan tersebut. Yousef mendapatkan pendanaan dari pamannya, Khalid Sheikh Mohammed, yang merupakan anggota jaringan Al-Qaeda (Global Security, n.d). Serangan Bom WTC 1993 merupakan serangan terorisme pertama di Amerika Serikat yang berasal dari Timur Tengah dan termasuk dalam kategori aksi terorisme internasional.

Serangan 9/11

Tahun 2001, Amerika Serikat kembali diguncang oleh aksi terorisme internasional. Peristiwa tersebut dikenal dengan Tragedi 9/11 karena terjadi pada tanggal 11 September 2001. Tragedi 9/11 diawali dengan pembajakan empat pesawat penerbangan komersial milik *United Airlines* dan *American Airlines* oleh 19 anggota militan yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Para pembajak secara terorganisir mengambil alih kendali pesawat dan melakukan serangan bunuh diri dengan cara menabrakkan pesawat ke Gedung Kembar WTC di New

York dan Gedung Pentagon di Washington D.C. (Kean, et al., 2004). Total korban tewas dalam Tragedi 9/11 mencapai 2.996 jiwa (Plumer, 2013). Selain korban tewas, setidaknya 8.900 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut (Johnston, 2018).

Tragedi 9/11 menjadi serangan terorisme paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melalui *Federal Bureau of Investigation* (FBI) melakukan investigasi besar-besaran untuk mengidentifikasi para pelaku dan mencari dalang dari peristiwa tersebut. Hasil investigasi FBI menemukan petunjuk dan bukti bahwa Mohamed Atta merupakan koordinator yang mengkoordinir pembajakan dan serangan terhadap Gedung Kembar WTC dan Gedung Pentagon.

Komisi khusus yang dibentuk Kongres Amerika Serikat, 9/11 Commission, dalam laporannya menyatakan Al-Qaeda sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas Tragedi 9/11. Pemerintah Amerika Serikat dengan berbagai bukti yang ada dan diperkuat dengan laporan intelijen Inggris kemudian menyatakan Al-Qaeda beserta para pimpinannya sebagai dalang utama dari Tragedi 9/11. Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, pada tanggal 20 September 2001 menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat bahwa musuh utama Amerika Serikat adalah jaringan terorisme global dan seluruh pemerintah yang mendukungnya (CNN, 2001).

Global War on Terror Sebagai Respon Terhadap Tragedi 9/11

Pasca Tragedi 9/11 dan seluruh bukti intelijen yang mengarah ke Al-Qaeda, George

W. Bush, selaku Presiden Amerika Serikat saat itu, melakukan respon cepat dengan mengeluarkan pernyataan resmi di depan Kongres dan rakyat Amerika Serikat untuk mencegah terulangnya tragedi yang sama sekaligus mengadili orang yang bertanggung jawab atas Tragedi 9/11. Pernyataan Presiden George W. Bush menandai diawalinya kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai respon terhadap Tragedi 9/11 yang didalangi oleh Al-Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat (2003) memformulasikan GWOT dengan menggunakan strategi 4D, yaitu *Defeat, Deny, Diminish* dan *Defend* dalam menghadapi terorisme global.

Pemerintah Amerika Serikat dalam pengimplementasian GWOT kemudian memobilisasi angkatan bersenjata setelah mendapatkan izin oleh Kongres melalui *Authorization for Use of Military Force* (AUMF) tahun 2001. AUMF merupakan instrumen penting dalam memberikan mandat kepada Presiden Amerika Serikat untuk melakukan penerjunan pasukan militer di luar negeri dalam rangka memerangi jaringan terorisme global tanpa dibatasi oleh *War Powers Resolution 1973* (Library of Congress, n.d). Penggunaan instrumen militer sangatlah vital dalam kebijakan GWOT (Record, 2003b). Strategi 4D dalam GWOT sangat bergantung dengan operasi intelijen dan militer untuk mengidentifikasi dan mengancurkan jaringan terorisme global.

Pan Sahel Initiative dan Trans Sahara Counterterrorism Partnership

Pemerintah Amerika Serikat melancarkan operasi militer untuk menumpas

jaringan terorisme di Afrika dengan membentuk *Operation Enduring Freedom-Trans Sahara* (OEF-TS). OEF-TS yang kemudian berubah nama menjadi *Operation Juniper Shield* memiliki area operasi di wilayah Sahel, Afrika. Pentingnya Afrika, khususnya wilayah Sahel, dalam penumpasan jaringan terorisme global tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik, kemiskinan, dan berkembangnya kelompok ekstrimis seperti Boko Haram dan *Al-Qaeda in Islamic Magreeb* (AQIM). Tingginya angka kemiskinan di negara-negara Sahel, menyebabkan meningkatnya instabilitas politik dengan semakin berkembangnya paham ekstrimisme radikal dan kekerasan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut ditambah dengan keberadaan Gurun Sahara yang luas memberikan peluang untuk pergerakan lintas batas secara ilegal dan tempat persembunyian untuk penyelundup dan teroris. Inilah yang menyebabkan wilayah Sahel dipilih menjadi salah satu wilayah operasi militer Amerika Serikat (Saidy, 2011).

Sebelum dilaksanakannya OEF-TS atau *Operation Juniper Shield*, Pemerintah Amerika Serikat terlebih dahulu membangun kemitraan dengan negara-negara Sahel melalui *Pan Sahel Initiative* (PSI). PSI dimulai tahun 2002 dengan menggandeng Mali, Niger, Chad, dan Mauritania. Misi utama PSI adalah memberikan pelatihan dan peralatan untuk meningkatkan kapabilitas personil keamanan negara-negara anggota untuk mendeteksi pergerakan lintas batas negara yang mencurigakan (Ellis, 2004). PSI kemudian digantikan oleh *The Trans Sahara Counterterrorism Partnership* (TSCTP) pada tahun 2005.

TSCTP beranggotakan negara-negara PSI dengan tambahan Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Libya, Moroko, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Pembentukan TSCTP dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman keamanan di wilayah Sahel setelah terjadinya aksi penculikan dan penyanderaan pada tahun 2003. Pada peristiwa tersebut, 32 turis asal Eropa diculik dan disandera oleh Kelompok Al-Para yang tergabung didalam organisasi teroris *Algerian Salafist Group for Call and Combat* (GSPC). Organisasi tersebut kemudian menyatakan bergabung dengan Al-Qaeda dan membentuk AQIM pada tahun 2007 (Steinberg et al, 2007). Aksi penculikan tersebut mendorong Pemerintah Amerika Serikat untuk membuat komitmen keamanan jangka panjang di wilayah Sahel untuk mencegah wilayah tersebut menjadi tempat berkembangnya paham ekstrimisme (Fellows, 2005).

Negara-negara Sahel yang tergabung didalam TSCTP mendapat sokongan dana dan bantuan teknis dari Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor keamanan, terutama untuk mendeteksi jaringan terorisme yang beroperasi di negaranya. TSCTP menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya *counterterrorism* Amerika Serikat di wilayah Sahel. Guna memperkuat TSCTP, Pemerintah Amerika Serikat kemudian membentuk area operasi militer baru di front Afrika dengan melancarkan OEF-TS atau Operation Juniper Shield.

Operation Enduring Freedom - Trans Sahara atau Operation Juniper Shield

OEF-TS atau Operation Juniper Shield merupakan front operasi militer Amerika Serikat yang dimulai pada bulan Februari 2007. Tujuan utama strategis dari operasi ini adalah menghancurkan jaringan Al-Qaeda yang beroperasi di wilayah Sahel (BBC, 2007). Area operasi OEF-TS mencakup sepuluh negara di wilayah Sahel, yaitu Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Mali, Mauritania, Moroko, Niger, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Berbeda dengan TSCTP yang berada dibawah kendali Departemen Luar Negeri, OEF-TS berada dibawah kendali Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan beroperasi dibawah komando *United States European Command* (EUCOM) sebelum dialihkan dibawah komando *United States Africa Command* (AFRIKOM) pada bulan Oktober 2008 (Coon, 2007).

Pada awalnya OEF-TS hanya merupakan komponen militer untuk mendukung TSCTP yang ditempatkan dibawah komando EUCOM. EUCOM kemudian melaksanakan OEF-TS melalui berbagai pelatihan militer untuk meningkatkan kemampuan regional negara-negara TSCTP untuk mengawasi wilayah-wilayah terpencil yang berpotensi untuk dieksploitasi oleh jaringan teroris. EUCOM kemudian memberikan mandat operasi kepada *Special Operations Command Europe* (SOCEUR) untuk membangun kemitraan yang kuat dalam rangka mendukung koalisi GWOT di Afrika (Berschinski, 2007). SOCEUR juga bertanggung jawab untuk mengembangkan jangkauan operasional untuk meningkatkan kemampuan deteksi, mencegah, menangkap, dan menghancurkan target yang berada di

wilayah operasionalnya (Global Security, 2012).

Misi vital SOCEUR mencakup memastikan negara-negara TSCTP dapat melakukan *counterterrorism* secara efektif di wilayahnya. Serta membantu meningkatkan kapabilitas bantuan operasional negara anggota untuk mendukung operasi koalisi GWOT, mencegah jatuhnya wilayah sebagai tempat persembunyian para teroris dan membantu logistik operasi militer (Ulmer, 2004). Selain itu, SOCEUR juga membentuk *Joint Special Operations Task Force–Trans Sahara* (JSOTF-TS) untuk membantu menemukan jaringan teroris Al-Qaeda dan teroris lainnya, memetakan wilayah yang berpotensi sebagai tempat persembunyian, menangkap dan melumpuhkan jaringan teroris yang beroperasi di wilayah tanggung jawab EUCOM (Global Security, 2018).

Setelah terbentuknya AFRIKOM di tahun 2007, seluruh tugas operasi OEF-TS beserta SOCEUR resmi diambil alih oleh AFRIKOM dari kendali EUCOM di tahun 2008. Tugas-tugas SOCEUR di wilayah Sahel dialihkan ke *Special Operation Command Africa* (SOCAFRICA). OEF-TS dan JSOTF-TS kemudian berganti nama menjadi *Operation Juniper Shield* dan *Joint Special Operations Task Force - Juniper Shield* (JSOTF-JS).

Pelaksanaan OEF-TS / *Operation Juniper Shield* merupakan upaya Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama TSCTP yang sudah berjalan. AFRIKOM dalam melaksanakan *Operation Juniper Shield* lebih mengutamakan upaya peningkatan kapabilitas negara-negara Sahel melalui pemberian bantuan senjata, pelatihan

militer serta peningkatan kapabilitas negara untuk melakukan *counterterrorism* di wilayahnya. Selain itu, AFRIKOM lebih lanjut menggunakan *Operation Juniper Shield* untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan regional negara-negara Sahel dengan Amerika Serikat (Office of the Secretary of Defense, 2017).

Selama berada dibawah komando AFRIKOM, operasi militer Amerika Serikat di wilayah Sahel mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari mulai diterjunkannya personil militer secara langsung di negara-negara Sahel pada tahun 2013 (Williams, 2013). JSOTF-JS melaporkan setidaknya pada akhir tahun 2017, Pemerintah Amerika Serikat telah menerjunkan 1.500 pasukan militer di wilayah Sahel dan sub-Sahara (Morgan & Bender, 2017). Niger menjadi negara dengan konsentrasi pasukan terbanyak Amerika Serikat dengan total mencapai 800 pasukan. Penerjukan pasukan Amerika Serikat di Niger sudah mulai dilakukan pada tahun 2013 dengan dikirimkannya 100 orang personil militer ke Niger.

Potensi Ancaman Terorisme di Niger

Amerika Serikat memandang Niger sebagai mitra penting dalam upaya memerangi jaringan terorisme global, khususnya Al-Qaeda, yang beroperasi di wilayah Sahel. Selain jaringan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda seperti AQIM dan *Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin* (JNIM), terdapat beberapa jaringan terorisme yang aktif di Niger. Jaringan tersebut adalah Boko Haram, *Movement for Oneness and Jihad in West Africa* (MUJAO), dan *Islamic State of*

Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS). Niger juga disinyalir dijadikan sebagai rute transit untuk mencari pendanaan melalui penyelundupan narkoba, senjata dan manusia oleh jaringan terorisme yang beroperasi di Afrika.

Selain penyelundupan narkoba dan senjata api, media Aljazeera (2019) dalam sebuah laporan menyatakan bahwa Niger menjadi jalur penyelundupan manusia dari wilayah Afrika Barat menuju Eropa. Para pelaku menempuh perjalanan darat dari Agadez melewati Gurun Sahara menuju Libya untuk selanjutnya menyeberangi Laut Mediterania menggunakan kapal penyelundup menuju Eropa. *International Organization of Migration* (IOM) setidaknya mengestimasi sejumlah 100.000 sampai 120.000 orang menuju Libya melalui jalur Gurun Sahara di Niger tahun 2015 (IOM, n.d). Besarnya angka pergerakan migrasi tersebut disinyalir dimanfaatkan oleh jaringan terorisme seperti AQIM dan JNIM untuk mendapatkan tambahan dana dengan terlibat didalam bisnis penyelundupan manusia.

Niger juga berpotensi menjadi basis perekrutan bagi anggota Al-Qaeda dan jaringan terorisme lainnya yang beroperasi di wilayah Sahel (Karimi, 2018). Hal ini tidak bisa dipisahkan dari letak geografis Niger yang menyebabkan negara tersebut menjadi sangat rawan bagi aktivitas perekrutan dan pergerakan lintas batas secara ilegal oleh anggota jaringan teroris. Besarnya pergerakan lintas batas di Niger tidak bisa dipisahkan dari kurangnya jumlah pasukan keamanan Niger dalam mengamankan wilayah perbatasan negaranya. Hal ini dikarenakan Niger berbatasan langsung

dengan Libya, Mali, Nigeria, Burkina Faso, Chad, Benin, dan Algeria. Total panjang perbatasan Niger dengan ketujuh negara tersebut mencapai 5.834 km sedangkan Niger hanya memiliki pasukan keamanan berjumlah 11.000 orang (World Atlas, 2018; Global Fire Power, n.d).

Selain masalah keamanan, kondisi ekonomi masyarakat Niger juga sangatlah rendah. World Bank (2017) dalam laporan tahunannya melaporkan bahwa hampir 44% dari 22,31 juta jiwa penduduk Niger hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan per-kapita dibawah 420 USD per tahun. Kondisi tersebut membuat Niger pada tahun 2017 menempati posisi terakhir dari 189 negara dalam laporan Human Developments Index (HDI) yang dikeluarkan oleh PBB (UNDP, 2018). Kerentanan ekonomi membuat lapisan masyarakat kelas bawah di Niger memiliki potensi yang lebih besar untuk direkrut sebagai anggota baru jaringan teroris (Parkinson & Mackenzie, 2018). Selain kondisi ekonomi, jaringan teror juga memanfaatkan konflik antar-etnis untuk merekrut anggota baru.

Seiring dengan bertambahnya anggota-anggota baru, angka serangan terorisme di Niger juga mengalami peningkatan secara drastis. Menurut laporan *Institute for Economics and Peace dalam Global Terrorism Index* (2016), Niger menempati posisi ke-16 sebagai negara dengan potensi ancaman terorisme di dunia. Sebuah peningkatan yang sangat tinggi dari posisi dua tahun sebelumnya yang hanya menempati posisi ke-58.

Kerja Sama Keamanan antara Amerika Serikat dengan Niger

Kerja sama keamanan Amerika Serikat dan Niger dimulai dari digandengnya Niger dalam kerja sama PSI dan TSCTP. Melalui PSI dan TSCTP Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan dana sebesar 74,7 juta USD kepada Pemerintah Niger. Selain melalui pemberian bantuan dana, Niger juga merupakan mitra penting Amerika Serikat dalam melaksanakan latihan gabungan militer melalui program *Flintlock*

Seiring dengan meningkatnya potensi ancaman di wilayah Sahel dan semakin banyaknya jaringan terorisme yang beroperasi di Niger, Pemerintah Amerika Serikat kemudian mendorong kerja sama keamanan yang lebih intensif dengan Niger melalui *Agreement on Defense Status of Forces*. Perjanjian tersebut diusulkan pada bulan Juli 2012 dan berlaku secara efektif pada bulan Januari 2013. *Agreement on Defense Status of Forces* merupakan instrumen kerja sama yang sangat penting bagi Pemerintah Amerika Serikat dan Niger dalam rangka menghadapi ancaman terorisme di Niger (Department of State, 2013b)

Agreement on Defense Status of Forces merupakan upaya *pursuit* terhadap jaringan-jaringan terorisme yang beroperasi di Niger. Upaya *pursuit* melalui *Agreement on Defense Status of Forces* dilakukan untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di negara tersebut untuk melumpuhkan jaringan terorisme yang beroperasi di negara tersebut. *Agreement on Defense Status of Forces* membuka akses bagi militer Amerika Serikat untuk

menerjunkan pasukan militernya serta mendirikan markas *drone*. Kontingen pasukan militer Amerika Serikat berjumlah 100 orang memasuki Niger pada bulan Januari hingga Februari 2013.

Masuknya pasukan militer Amerika Serikat ini bersamaan dengan dilaksanakannya *Operation Serval* oleh pasukan militer Perancis di Mali untuk memerangi jaringan AQIM dan MUJAO. Guna mendukung pasukan militer Perancis, Pemerintah Amerika Serikat kemudian mendirikan markas operasi di Ibukota Niamey, Niger, untuk memberikan informasi intelijen sekaligus memantau pergerakan jaringan terorisme di Niger.

Agreement on Defense Status of Forces juga menjadi landasan bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk membuka markas *drone* kedua di wilayah Agadez. Agadez merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah Niger dan memiliki posisi yang strategis untuk menjangkau wilayah-wilayah utara dan selatan Afrika, serta memberikan akses bagi militer Amerika Serikat untuk memonitor Gurun Sahara. Pengoperasian markas *drone* di Agadez dianggap perlu sebagai upaya *preparation* oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin intensif di Niger. Pengoperasian *drone*, pelatihan militer, dan penggunaan intelijen merupakan serangkaian upaya *preparation* untuk menghadapi dan menangkal potensi serangan terorisme di Niger.

Penempatan Pasukan Militer Amerika Serikat di Niger

Pemerintah Amerika Serikat memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai dengan penempatan pasukan militernya di Niger. Tujuan pertama adalah menjaga keamanan nasional Amerika Serikat dari potensi serangan jaringan terorisme yang beroperasi di wilayah Sahel, khususnya Niger. Hal ini didasari oleh trauma Tragedi 9/11 dan sebagai langkah preventif untuk memastikan potensi serangan tidak bermanifestasi menjadi serangan langsung terhadap teritorial Amerika Serikat dan menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Tindakan preventif dilakukan secara aktif oleh Pemerintah Amerika Serikat dikarenakan terjadinya pemindahan basis perekrutan dan pelatihan dari wilayah Afganistan dan Irak menuju wilayah Sahel dengan Niger sebagai salah satu tujuan potensial.

Hal ini sesuai dengan strategi yang disampaikan Hughes (2011) terkait penempatan pasukan Amerika Serikat yang terus bertambah di Niger sebagai upaya *prevention* Amerika Serikat untuk mencegah Niger jatuh sebagai safe haven bagi jaringan terorisme. Pendekatan *hard approach* di wilayah Sahel dan Niger oleh Pemerintah Amerika Serikat sejalan dengan strategi yang diutarakan oleh Hughes (2011) yang menekankan pada strategi *pursuit*, *preparation*, *prevention*, dan *protection* dalam menghadapi jaringan terorisme transnasional. Keempat strategi tersebut juga sangat sejalan dengan strategi 4D yang digunakan Pemerintah Amerika Serikat dalam pengimplementasian GWOT.

Strategi Hughes (2011) lainnya berupa *pursuit* dapat dilihat dari kerja sama

keamanan antara Amerika Serikat dan Niger melalui *Agreement on Defense Status of Forces* yang memberikan izin kepada pasukan militer Amerika Serikat untuk beroperasi di Niger. *Preparation* tercermin dari pelatihan gabungan *Flintlock* untuk meningkatkan kemampuan *counterterrorism* pasukan Niger dan pembangunan markas drone Amerika Serikat di Agadez sebagai upaya peningkatan kemampuan intelijen di wilayah Gurun Sahara. Seluruh upaya *pursuit*, *preparation* dan *prevention* berujung pada *protection* terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dari potensi ancaman terorisme. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Buzan (1991) yang menyatakan bahwa negara melihat permasalahan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini didasari oleh tujuan keamanan yang menginginkan sebuah kondisi hilangnya ancaman terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia untuk menjalani kehidupannya dan terorisme merupakan ancaman terhadap kondisi tersebut.

Tujuan kedua dari penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger adalah memberikan dukungan kepada aliansi Amerika Serikat di Afrika yang terlibat di dalam perang melawan jaringan terorisme global. Sejak dimulainya kerja sama PSI tahun 2002 dan terbentuknya TSCTP di tahun 2005, Pemerintah Amerika Serikat terus menggerakkan negara-negara Sahel untuk turut berperan aktif sebagai bagian dari koalisi internasional untuk menumpas jaringan terorisme global. Amerika Serikat turut membantu intervensi Perancis di Mali yang dimulai tahun 2013 karena semakin memburuknya kondisi stabilitas keamanan di

wilayah Sahel yang memerlukan penanganan secara cepat dari dunia internasional.

Pemerintah Amerika Serikat merespon langsung pelaksanaan intervensi oleh Perancis dengan memberikan dukungan logistik bagi penerjunan pasukan militer Perancis dan bantuan intelijen. Bantuan intelijen dalam konteks ini adalah penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Niger untuk memantau pergerakan jaringan terorisme di Niger yang menggunakan rute Gurun Sahara sebagai jalur penyelundupan senjata dan anggota untuk menyerang Mali. Selain sebagai rute penyerangan, Niger juga merupakan wilayah pelarian yang paling strategis. Sehingga, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antara pasukan militer Perancis di Mali dengan pasukan militer Amerika Serikat di Niger untuk mendeteksi, menghancurkan, dan mencegah pergerakan anggota jaringan terorisme dari Niger dan Mali.

Selain mendukung Perancis, Pemerintah Amerika Serikat juga secara intensif membantu Pemerintah Niger untuk mencegah instabilitas di Mali untuk tidak merembes sampai ke Niger. Menjaga stabilitas di Niger sangatlah penting bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah Niger menjadi zona perang melawan terorisme dan memicu instabilitas regional di wilayah Sahel. Jika hal itu terjadi maka dapat merugikan koalisi internasional yang dibangun oleh Pemerintah Amerika Serikat. Stabilitas Niger secara tidak langsung akan memengaruhi potensi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Melalui penempatan pasukan militer di Niger, Pemerintah Amerika Serikat dapat mencapai

dua tujuan tersebut dalam rangka menjaga keamanan nasional negaranya.

5. KESIMPULAN

Keamanan merupakan isu yang sangat kuat dalam mendorong negara untuk melakukan kerja sama keamanan dan memobilisasi kekuatan militernya untuk melindungi keamanan nasionalnya dari potensi ancaman. Upaya negara dalam menghadapi ancaman keamanan kontemporer seperti serangan terorisme adalah dengan melakukan tindakan atau serangan balasan atau dengan menerapkan strategi *pursuit*, *preparation*, *prevention*, dan *protection* yang digambarkan oleh Hughes. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama keamanan antar kedua negara dibidang *counterterrorism*.

Penempatan pasukan militer Amerika Serikat menggunakan pendekatan *pursuit*, *preparation*, *prevention* dan *protection* untuk memastikan Niger tidak menjadi tempat persembunyian, perekrutan, dan pelatihan bagi jaringan terorisme. Adapun kebijakan *counterterrorism* yang bersifat preventif seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui penempatan pasukan militernya di Niger dilakukan dengan dua tujuan. Dua tujuan tersebut, yaitu; menjaga keamanan nasional suatu negara dengan melemahkan potensi pelaku teror di negara lain, dan mendukung upaya kerja sama global melalui penguatan aliansi dalam menghadapi ancaman terorisme.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al-Jazeera. (2019). Niger: Europe Migration. Al-Jazeera. Diakses 12 Februari 2019. <https://www.aljazeera.com/progra>

- mmes/peopleandpower/2019/01/niger-europe-migration-190110051916545.html
- BBC. (2007) US to get Africa command centre British Broadcasting Corporation. Diakses: 1 Januari 2019. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6336063.stm>
- Berschinski, Robert. (2007). *AFRICOM Dilemma: The Global War on Terrorism, Capacity Building, Humanitarianism, and The Future of U.S Security Policy in Africa*. Strategic Studies Institute.
- Browne, Ryan. (2018). US military reveals new firefight in Niger. CNN. Diakses pada 2 Juni 2018 <https://edition.cnn.com/2018/03/15/politics/niger-firefight-december/index.html>
- Bush White House. (2003). *President Bush Release National Strategy for Combating Terrorism*. United States Government. Diakses 29 Juli 2018. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030214-7.html>
- Buzan, Barry. (1991). *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*.
- CNN (2001) Bush Gives Update on War Against Terrorism Diakses 10 Desember 2018. <http://edition.cnn.com/2001/US/10/11/gen.bush.transcript/>
- Cook, L & Brown, N. (2018) World Trade Center bombing 1993: Victims, investigation, impact on NYC and more AM New York. Diakses 7 Desember 2018. <https://www.amny.com/news/world-trade-center-bombing-1993-1.16926341>
- Coon, Charlie. (2007). AFRICOM begins taking over Africa-based activities, programs Diakses 1 Januari 2019 <https://www.stripes.com/news/africom-begins-taking-over-africa-based-activities-programs-1.69469>
- Department of State (2013b) *Treaties and other International Acts Series 13-128*. U.S Government. Diakses 10 Februari 2019. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/205314.pdf>
- Ellis, Stephen. (2004) *Briefing: The Pan-Sahel Initiative*. Royal African Society.
- Fellows, Catherine. (2005) US targets Sahara 'terrorist haven'. BBC News. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4749357.stm>
- Global Firepower (n.d) *Niger Military Strength*. Global Firepower.com. Diakses 18 Februari 2019. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=niger
- Global Security (2012) *Special Command Operation Europe* Global Security.com. Diakses 8 Desember 2018. <https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/soceur.htm>
- Global Security (2018) *Joint Special Operation Task Force – Juniper Shield* Global Security.com. Diakses 8 Desember 2018. <https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/jsotf-ts.htm>
- Global Security (n.d) *Khalid Sheikh Mohammed* Global Security.com. Diakses 8 Desember 2018. <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ksm.htm>
- Goins, Mercedes. (2017) *Remembering Murrah: 1995 OKC bombing through eyes of a first responder* Enid News and Eagle. Diakses 7 Desember 2018. https://www.enidnews.com/news/remembering-murrah-okc-bombing-through-eyes-of-a-first-responder/article_d801c518-2503-11e7-a470-ff4660b1d832.html
- Hughes, Geraint. (2011). *The Military's Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies*. Strategic Studies Institute: PA.
- Institute for Economics and Peace (2016). *Global Terrorism Index 2016*. Economic Sand Peace.org. Diakses 19 Februari 2019. <http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf>
- International Organization of Migration. (n.d). *Niger*. IOM. Diakses 12 Februari 2019. <https://www.iom.int/countries/niger>.
- Johnston, Robert. (2018). *Worst Terrorist Strikes in United States* Johnston Archive. Diakses 10 Desember 2018. <http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp255us.html>
- Karimi, Faith. (2018). *US has hundreds of troops in Niger. Here's why* CNN. Diakses 10 Januari 2019. <https://edition.cnn.com/2018/05/10/politics/niger-american-troops-presence/index.html>
- Kean, Thomas H, and Lee Hamilton. (2004) *The 9/11 Commission Report: Final*

- Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Washington, D.C.: National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2004.
- Litt, David. (2007). Why Is the United States in Niger, Anyway? Foreign Policy.com. Diakses pada 28 Mei 2018. <http://foreignpolicy.com/2017/10/25/why-is-the-united-states-in-niger-anyway/>
- Morgan, Wesley & Bender, Bryan. (2017). America's Shadows War in Africa Politico.com. Diakses 12 Desember 2018. <https://www.politico.com/story/2017/10/12/niger-shadow-war-africa-243695>
- Norman, Greg (2018). US Forces Ambushed in Niger Again, Military Says Fox News. Diakses 3 Juni 2018. <http://www.foxnews.com/us/2018/03/15/us-forces-ambushed-in-niger-again-military-says.html>
- Office of the Secretary of Defense (2017) Justification for Base Funded Contingency Operations and the Overseas Contingency Operations Transfer Fund (OCOTF). U.S Government. Diakses 12 Desember 2018. https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/FY2018_OCOTF_Justification_Book_FINAL.pdf
- Parkinson, Joe & Mackenzie. (2018) A Nest of Spies: Niger's Deserts Become Front Line of Fight Against Jihadism Wall Street Journal. Diakses 10 Januari 2019. <https://www.wsj.com/articles/a-nest-of-spies-how-poverty-stricken-niger-is-becoming-a-security-hub-for-the-west-1537176601>
- Plumer, Brad (2013). *Nine facts about terrorism in the United States since 9/11*. The Washington Post. Diakses 15 Desember 2018. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/11/nine-facts-about-terrorism-in-the-united-states-since-911/?noredirect=on&utm_term=.e22478f3084a
- Record, Jeffrey. (2003a). The Bush Doctrine and War with Iraq. Army War College. Diakses pada 28 Mei 2018 <https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/articles/03spring/record.pdf>
- Record, Jeffrey. (2003b). Bounding the Global War on Terrorism. Army War College. Diakses 13 Februari 2019. <https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB207.pdf>
- Romaniuk, Peter and Fink, Naureen Chowdhury. (2012). From Input to Impact Evaluating Terrorism Prevention Programs. Center on Global Counterterrorism Cooperation
- Saidy, Brahim. (2011) American Interests in the Western Sahara Conflict. American Foreign Policy Interests. Diakses 14 Februari 2019. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803920.2011.570735>
- Steinberg, Guido; Isabelle Werenfels. (2007). Between the 'Near' and the 'Far' Enemy: Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Mediterranean Politics.
- Udounwa, Effiong Solomon. (2013). Boko Haram: Developing New Strategies to Combat Terrorism in Nigeria. United States Military War College.
- Ulmer, Phillip (2004) Special Forces Support Pan Sahel Initiative in Africa, American Forces Press Service. Diakses 12 Desember 2018. www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=27112.
- United Nations Development Program. (2018). HDR Report 2018. United Nations. Diakses 12 Februari 2019. <http://hdr.undp.org/en/2018-update>
- United States Government. (2003) National Strategy to Combating Terrorism. The White House: Washington D.C
- Varga, Gergely. (2017). Building Partnership in Challenging Times: The Defence Arrangements of Tunisia. Euromesco.
- Williams, Matt. (2013). US Troops Send to Niger to Bolster Military Presence in West Africa. The Guardian. Diakses 12 Desember 2018. www.theguardian.com/world/2013/feb/22/us-troops-niger-west-africa
- Wilson, Alex. (2010). Does Terrorism Pose a Real Threat to Security?. e-ir.com. Diakses 12 September 2018. https://www.e-ir.info/2010/11/22/does-terrorism-pose-a-real-threat-to-security-2/#_ftn18
- World Atlas. (2018). Which Countries Borders Niger ? World Atlas.com. Diakses 12 Februari 2019. <https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-border-niger.html>
- World Bank (2017) The World Bank in Niger. World Bank.com. Diakses 16 Februari 2019.

<http://www.worldbank.org/en/country/niger/overview>

World Bank (n.d) GDP Percapita. The World Bank in Niger. World Bank.com. Diakses 16 Februari 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=NG>

Zakharchenko, Anna. I. (2007). The EU and U.S. Strategies against Terrorism and Proliferation of WMD: A Comparative Study. European Center for Security Studies